Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SUKAMANAH KECAMATAN RONGGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Dede Rizwan
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available November 2026

dederizwansatu@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Pembangunan infrastruktur desa memerlukan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi, serta upaya pemerintah desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sukamanah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran Governance, Participatory Governance, dan konsep Partisipasi Masyarakat dengan metode deskriptif kualitatif dan paradigma konstruktivisme. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah terlaksana pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, serta pengawasan dan evaluasi. Partisipasi paling tinggi terlihat pada tahap pelaksanaan melalui gotong royong, swadaya, dan Program Padat Karya Tunai, sedangkan keterlibatan dalam perencanaan serta pengawasan dan evaluasi masih didominasi sistem perwakilan. Faktor yang memengaruhi partisipasi meliputi komunikasi pemerintah desa, kesadaran masyarakat, kondisi sosial ekonomi, keterbatasan waktu, dan anggaran. Pemerintah desa berupaya meningkatkan partisipasi melalui musyawarah desa, penyebaran informasi, pelibatan masyarakat, dan penguatan gotong royong. Dengan demikian, partisipasi masyarakat telah berjalan cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan pada seluruh tahapan pembangunan.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur, governance, participatory governance, pembangunan desa.

A B S T R A C T

Rural infrastructure development requires community participation to achieve effective, sustainable, and community-oriented development. This study aims to analyze the forms of community participation, the factors influencing participation, and the efforts of the village government to increase community involvement in infrastructure development in Sukamanah Village, Rongga District, West Bandung Regency. This study employs the theoretical frameworks of Governance, Participatory Governance, and the concept of Community Participation, using a descriptive qualitative method and a constructivist paradigm. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that community participation has been implemented in the stages of planning, implementation, utilization of development outcomes, as well as monitoring and evaluation. The highest level of participation occurs during the implementation stage through mutual cooperation, community self-help, and the Cash for

Work Program, while involvement in planning, monitoring, and evaluation remains largely based on a representative system. Factors influencing participation include village government communication, public awareness, socio-economic conditions, time constraints, and budget limitations. The village government seeks to enhance participation through village deliberations, information dissemination, community involvement, and strengthening mutual cooperation. Therefore, community participation has been implemented fairly well, although further improvement is needed across all stages of development.
***Keywords**: community participation, infrastructure development, governance, participatory governance, rural development.*

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai subjek pembangunan, desa memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan sumber daya yang berbeda-beda sehingga pelaksanaan pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat. Pembangunan desa menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Astika dan Subawa (2021) menjelaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa semakin menguat sebagai strategi untuk mempersempit kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan.

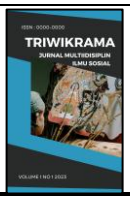
Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong kemajuan desa. Keberadaan jaringan jalan, sistem drainase, pasar desa, dan fasilitas umum lainnya memiliki peran strategis dalam memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas perekonomian setempat. Hussain et al. (2022) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat secara aktif cenderung menghasilkan manfaat yang lebih berkelanjutan dan dapat dirasakan secara lebih merata. Sejalan dengan hal tersebut, Foster et al. (2023) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan melalui perluasan akses masyarakat terhadap pasar ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur desa tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi dalam musyawarah desa, keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, serta pengawasan dan pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun (Hussain et al., 2022). Shetunyenga (2024) menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti komunikasi pemerintah, tingkat pendidikan, kepemimpinan lokal, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Rendahnya keterlibatan masyarakat dapat menghambat efektivitas serta keberlanjutan program pembangunan desa.

Kondisi tersebut juga menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sukamanah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Profil Desa Sukamanah Tahun 2024/2025, desa ini memiliki luas wilayah sekitar 956,930 hektare dengan jumlah penduduk sebanyak 8.452 jiwa, terdiri atas 4.350 laki-laki dan 4.102 perempuan serta 2.800 kepala keluarga. Desa Sukamanah telah melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur, di antaranya pembangunan GOR futsal, perbaikan jaringan drainase, pembangunan aula desa, dan pasar desa. Namun, pelaksanaan pembangunan tersebut masih menghadapi permasalahan, terutama minimnya kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa dan belum optimalnya keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong.

Permasalahan partisipasi tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan profil desa, mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh harian lepas sebanyak 3.015 orang, buruh tani sebanyak 551 orang, dan petani sebanyak 315 orang. Kondisi tersebut

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



menyebabkan sebagian masyarakat lebih memprioritaskan pekerjaan sehari-hari sehingga memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti musyawarah maupun kegiatan gotong royong pembangunan desa. Selain itu, masih terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi keterlibatan masyarakat sehingga diperlukan upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi secara lebih luas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sukamanah penting dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi, serta upaya pemerintah desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu politik, khususnya kajian partisipasi masyarakat di tingkat lokal, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

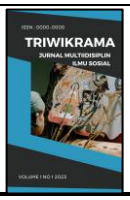
Landasan teori dalam penelitian ini disusun berdasarkan tiga tingkatan, yaitu *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*. Ketiga landasan tersebut saling berkaitan dalam menjelaskan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur desa. Konsep *Governance* digunakan sebagai teori utama untuk memahami hubungan antara pemerintah dan masyarakat, *Participatory Governance* menjelaskan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan, sedangkan konsep partisipasi masyarakat digunakan untuk menganalisis keterlibatan warga dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur.

Governance merupakan konsep dalam ilmu politik dan administrasi publik yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi bersifat hierarkis dan hanya berpusat pada pemerintah. Sebaliknya, proses pemerintahan melibatkan berbagai aktor, seperti masyarakat dan sektor non-pemerintah, dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan publik. Dalam perspektif ini, pemerintah bukan satu-satunya aktor yang memiliki peran dominan, melainkan bagian dari jaringan yang saling berinteraksi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Mark Bevir dan R. A. W. Rhodes (2018), *governance* dipahami sebagai proses pemerintahan berbasis jaringan (*network governance*), yaitu kebijakan publik terbentuk melalui interaksi berbagai aktor yang memiliki ketergantungan satu sama lain dalam proses pengambilan keputusan.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan hubungan dan kerja sama antarpihak, bukan hanya bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks pembangunan infrastruktur desa, konsep *governance* menjelaskan bahwa pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Pemerintah desa dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, hubungan yang kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur.

Participatory Governance merupakan pendekatan tata kelola pemerintahan yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi atau pihak yang memperoleh manfaat dari kebijakan pemerintah, tetapi juga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com



masukan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Dalam pemerintahan lokal, khususnya desa, keterlibatan masyarakat diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Menurut OECD (2022), partisipasi publik dalam *governance* dapat dijelaskan melalui tiga tingkatan utama, yaitu; *Information, Consultation, Active Participation*. Ketiga tingkatan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyampaian informasi, tetapi perlu dilanjutkan dengan pemberian ruang konsultasi dan keterlibatan aktif dalam proses pembangunan. Dalam pembangunan infrastruktur desa, *participatory governance* menjadi landasan untuk memahami hubungan dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas serta keberhasilan pembangunan.

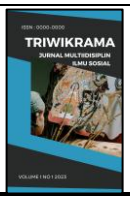
Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif warga dalam proses pembangunan, baik melalui penyampaian gagasan, kontribusi tenaga, pemberian dukungan, pemanfaatan hasil, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Partisipasi tidak hanya menunjukkan kehadiran masyarakat dalam kegiatan pembangunan, tetapi juga menggambarkan peran masyarakat dalam menentukan arah dan keberlanjutan pembangunan. Menurut Totok dalam Mardikanto dan Soebianto (2012), partisipasi masyarakat merupakan bagian dari proses pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Pandangan ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan peran untuk menentukan kebutuhan, memberikan kontribusi, serta ikut bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan di lingkungannya.

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur desa. Masyarakat tidak hanya berperan dalam pelaksanaan pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memanfaatkan, menjaga, dan mengawasi hasil pembangunan agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini, konsep partisipasi masyarakat dioperasionalkan ke dalam empat aspek utama, yaitu; Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan, Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan, Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan, Partisipasi dalam Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Keempat aspek tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sukamanah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat.

Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari konsep *governance* yang menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya didominasi oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat dan aktor lainnya melalui hubungan yang bersifat kolaboratif. Dalam konteks pembangunan desa, pembangunan infrastruktur merupakan hasil interaksi, koordinasi, dan kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Selanjutnya, konsep *participatory governance* digunakan untuk menjelaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Partisipasi tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi mencakup penyampaian informasi, konsultasi, hingga keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.

Sementara itu, konsep partisipasi masyarakat digunakan untuk melihat bentuk nyata keterlibatan warga dalam pembangunan infrastruktur desa. Keterlibatan tersebut mencakup empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, serta pengawasan dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian, ketiga konsep tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi. *Governance* memberikan landasan untuk memahami hubungan antara pemerintah

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



desa dan masyarakat, *participatory governance* menjelaskan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pembangunan, sedangkan konsep partisipasi masyarakat digunakan untuk menganalisis keterlibatan warga dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur desa.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk melihat perkembangan kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sekaligus mengetahui persamaan, perbedaan, dan posisi penelitian yang dilakukan. Pertama, penelitian Kharismania dan Evi (2023) yang mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menemukan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa, kegiatan gotong royong, serta pengawasan pembangunan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa kualitas komunikasi antara aparatur pemerintah desa dan masyarakat menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat keterlibatan warga dalam kegiatan pembangunan.

Kedua, penelitian Elvandari et al. (2025) mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa menjelaskan pentingnya pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Dengan adanya rasa memiliki tersebut, fasilitas yang telah dibangun cenderung lebih terjaga dan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Ketiga, penelitian Astika dan Subawa (2021) mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa menemukan bahwa kontribusi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti sumbangan tenaga, pemikiran dan gagasan, bantuan material, serta kehadiran dalam forum rapat desa. Namun, penelitian tersebut juga menemukan adanya hambatan berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk terlibat secara aktif dan konsisten dalam kegiatan pembangunan desa.

Keempat, penelitian Pitu (2021) mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat cenderung lebih tinggi pada tahap pelaksanaan dibandingkan dengan tahap pengawasan dan evaluasi. Masyarakat lebih banyak terlibat dalam kegiatan gotong royong dan pelaksanaan pembangunan fisik, sedangkan keterlibatan dalam pengawasan serta evaluasi pembangunan masih belum optimal. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat perlu diperkuat pada seluruh tahapan pembangunan, bukan hanya pada tahap pelaksanaan.

Kelima, penelitian Feng et al. (2022) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta kualitas pembangunan desa. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama dan keterlibatan berbagai pihak dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang lebih baik.

Keenam, penelitian Hussain et al. (2022) mengenai dampak sosial ekonomi proyek infrastruktur perdesaan terhadap pengembangan masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa, sistem drainase, dan fasilitas publik, memiliki peran dalam meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas perekonomian desa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketujuh, penelitian Shetunyenga (2023) mengenai hambatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menemukan bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat secara konsisten pada setiap tahapannya cenderung menghasilkan capaian yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa budaya gotong royong yang berkembang dalam

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com

masyarakat serta komunikasi terbuka antara pemerintah dan warga merupakan fondasi penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kedelapan, penelitian Antó et al. (2021) mengenai *The Planetary Wellbeing Initiative* menjelaskan pentingnya pembangunan berbasis komunitas dalam memperkuat keterlibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan tidak hanya dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas yang dibangun, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan kohesi sosial antarwarga. Hubungan sosial tersebut menjadi salah satu modal penting bagi keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.

Kesembilan, penelitian Shetunyenga (2024) mengenai nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki peran besar dalam meningkatkan keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan, memperkuat keberlanjutan pembangunan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Kesepuluh, penelitian Tung et al. (2022) mengenai Program Nasional Pembangunan Perdesaan Baru di Vietnam menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan merupakan faktor penting dalam menciptakan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dapat memperkuat tata kelola pembangunan lokal serta meningkatkan keberhasilan program pembangunan desa.

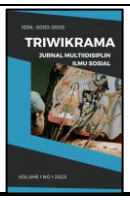
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan penting dalam pembangunan desa, baik melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, maupun pengawasan pembangunan. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah, kesadaran masyarakat, budaya gotong royong, dan keterlibatan aktif warga menjadi faktor yang berkaitan dengan keberhasilan pembangunan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara umum. Belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa dengan menggunakan perspektif *governance*, yang menekankan hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui tata kelola kolaboratif di tingkat desa.

Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif *governance* untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sukamanah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Partisipasi masyarakat tidak hanya dipandang sebagai bentuk keterlibatan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme tata kelola pemerintahan desa yang menekankan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sukamanah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Partisipasi masyarakat yang dikaji meliputi keterlibatan warga dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil pembangunan, serta pengawasan dan evaluasi. Adapun objek pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus penelitian meliputi perbaikan drainase atau saluran air, pembangunan pasar desa, dan pemanfaatan aula desa. Ketiga objek tersebut dipilih karena mewakili kondisi pembangunan yang berbeda, yaitu pembangunan yang masih berlangsung, pembangunan yang telah selesai dan dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, serta fasilitas umum yang digunakan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlandaskan paradigma konstruktivisme. Menurut Sugiyono (2023), metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena sebagaimana adanya tanpa bermaksud menguji hipotesis tertentu. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami pengalaman, persepsi, perilaku, dan interaksi sosial masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Sementara itu, menurut Hurst (2023), paradigma konstruktivisme memandang bahwa realitas sosial terbentuk melalui pengalaman, interaksi, dan pemaknaan individu terhadap suatu fenomena. Dengan demikian, paradigma ini digunakan untuk memahami makna partisipasi berdasarkan pengalaman masyarakat serta hubungan antara pemerintah desa dan warga dalam proses pembangunan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam pembangunan infrastruktur desa. Penentuan jumlah informan mengikuti prinsip *data saturation* atau kejenuhan data. Informan penelitian meliputi akademisi, praktisi pemerintahan desa, serta masyarakat Desa Sukamanah. Praktisi yang menjadi informan antara lain Kepala Desa, perangkat desa, Ketua BPD, Ketua RW, dan Pendamping Desa. Sementara itu, informan masyarakat terdiri atas tokoh masyarakat, warga yang aktif dalam kegiatan pembangunan, masyarakat pendatang, dan masyarakat umum. Adapun data sekunder diperoleh melalui Profil Desa Sukamanah Tahun 2024/2025, dokumen pembangunan infrastruktur, foto kegiatan, serta buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi pembangunan infrastruktur, keterlibatan masyarakat dalam gotong royong dan musyawarah desa, pemanfaatan fasilitas umum, serta interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan warga, hambatan pembangunan, serta upaya pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis maupun visual, seperti profil desa, data kependudukan, laporan pembangunan, foto kegiatan, notulen rapat, dan dokumen pendukung lainnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan dan menganalisis data, hingga menarik kesimpulan. Adapun instrumen pendukung yang digunakan meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara, buku catatan, kamera, alat perekam suara, serta dokumen pendukung.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri atas empat komponen, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, kondensasi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikondensasi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, maupun bagan untuk memudahkan pemahaman terhadap hubungan antardata dan pola yang ditemukan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com

membandingkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi agar diperoleh temuan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagaimana dijelaskan oleh Creswell dan Poth (2018). Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu yang berbeda. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala desa, perangkat desa, BPD, ketua RW, tokoh masyarakat, dan warga. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memperoleh informasi yang konsisten. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukamanah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki kegiatan pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai, sehingga relevan untuk mengkaji keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan. Penelitian direncanakan berlangsung pada Mei hingga Juni 2026 melalui tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, dan penyusunan laporan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

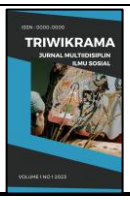
Desa Sukamanah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Desa ini terbentuk pada tanggal 18 Agustus 1983 sebagai hasil pemekaran dari Desa Cinengah. Pemekaran tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang lebih efektif serta luasnya wilayah Desa Cinengah pada saat itu. Nama Sukamanah berasal dari istilah bahasa Sunda, yaitu suka yang berarti senang dan manah yang berarti hati. Penamaan tersebut berkaitan dengan berdirinya SDN Sukamanah pada tahun 1967 yang memberikan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat setempat.

Secara geografis, Desa Sukamanah memiliki luas wilayah sekitar 956,930 hektare dan berbatasan dengan Desa Cinengah di sebelah utara, Desa Bojong di sebelah barat, Desa Cibedug di sebelah selatan, serta Desa Cinta Asih di sebelah timur. Berdasarkan Profil Desa Sukamanah Tahun 2024/2025, jumlah penduduk mencapai 8.452 jiwa, terdiri atas 4.350 laki-laki dan 4.102 perempuan, dengan 2.800 kepala keluarga. Wilayah administratifnya terbagi menjadi empat dusun, 28 Rukun Warga (RW), dan 84 Rukun Tetangga (RT).

Dari aspek sosial ekonomi, sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian dan pekerjaan informal, seperti buruh harian lepas, buruh tani, dan petani. Kondisi tersebut turut memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan karena sebagian warga harus memprioritaskan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, dari aspek sarana dan prasarana, Desa Sukamanah telah memiliki berbagai fasilitas umum, seperti kantor desa, Poskesdes, 13 Posyandu, tempat ibadah, sarana olahraga, balai pertemuan, pasar desa, jembatan, dan jaringan jalan. Keberadaan berbagai fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, serta pelayanan masyarakat.

Kondisi geografis, demografis, sosial ekonomi, dan ketersediaan sarana prasarana tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Sukamanah membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Dengan jumlah penduduk dan potensi sumber daya manusia yang

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



cukup besar, partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sukamanah dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Kasi Pelayanan, Kasi Perencanaan, Pendamping Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RW, masyarakat aktif, masyarakat biasa, dan masyarakat pendatang. Pembahasan hasil penelitian mengacu pada konsep partisipasi masyarakat menurut Mardikanto dan Soebianto (2012), yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Partisipasi tersebut dianalisis melalui empat aspek, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, serta pengawasan dan evaluasi pembangunan. Selain itu, perspektif Governance menurut Bevir dan Rhodes (2018) digunakan untuk menjelaskan hubungan dan interaksi antaraktor dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Participatory Governance menurut OECD (2022) digunakan untuk melihat keterlibatan masyarakat melalui tiga tingkatan, yaitu information, consultation, dan active participation.

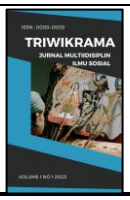
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan desa. Pada tahap ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan, aspirasi, serta berbagai permasalahan yang dihadapi di lingkungan masing-masing sebagai bahan pertimbangan pemerintah desa dalam menetapkan program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak yang memahami kondisi dan kebutuhan wilayahnya. Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sukamanah dilaksanakan melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Kedua forum tersebut menjadi wadah bagi pemerintah desa, BPD, perangkat wilayah, serta perwakilan masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan sebelum ditetapkan sebagai program prioritas desa. Usulan yang disampaikan selanjutnya dikaji berdasarkan kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kemampuan anggaran desa, serta kesesuaiannya dengan arah pembangunan desa.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Sukamanah, masyarakat mempunyai peran penting dalam proses perencanaan pembangunan. Usulan yang disampaikan melalui Musdes dan Musrenbangdes menjadi bahan pertimbangan pemerintah desa dalam menentukan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran desa. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sejak tahap awal pembangunan. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dalam menentukan kebutuhan pembangunan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Kharismania dan Evi (2023), yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa salah satunya dilakukan melalui forum musyawarah. Musyawarah menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan melalui forum yang disediakan pemerintah desa. Dengan demikian, hasil penelitian di Desa Sukamanah memperkuat temuan sebelumnya bahwa musyawarah merupakan salah satu mekanisme penting dalam membangun keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan.

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Apabila dianalisis berdasarkan konsep Participatory Governance OECD (2022), penyediaan informasi mengenai program pembangunan dan pelaksanaan Musdes serta Musrenbangdes menunjukkan adanya penerapan tingkatan information dan consultation. Pemerintah desa memberikan informasi mengenai pembangunan sekaligus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan, masukan, dan kebutuhan. Namun, keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya mencapai tingkat active participation karena proses penyampaian aspirasi dan pengambilan keputusan masih banyak dilakukan melalui mekanisme perwakilan. Sementara itu, berdasarkan perspektif Governance Bevir dan Rhodes (2018), proses perencanaan pembangunan menunjukkan adanya interaksi antara pemerintah desa, BPD, perangkat wilayah, dan masyarakat. Pemerintah desa tidak sepenuhnya bekerja sendiri, tetapi menerima dan mempertimbangkan aspirasi dari berbagai aktor sebelum menetapkan prioritas pembangunan. Hubungan tersebut memperlihatkan adanya praktik tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak dalam proses pembangunan desa.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan di Desa Sukamanah telah berjalan cukup baik. Pemerintah desa telah menyediakan ruang partisipasi melalui Musdes dan Musrenbangdes, sedangkan masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Namun, keterlibatan langsung masyarakat masih belum merata karena sebagian besar aspirasi disampaikan melalui mekanisme perwakilan serta masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme penyampaian usulan pembangunan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan merupakan tahapan setelah rencana pembangunan ditetapkan. Pada tahap ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga dapat terlibat secara langsung melalui tenaga, material, swadaya, gotong royong, maupun bentuk dukungan lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Sukamanah menunjukkan keterlibatan yang cukup baik dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Bentuk partisipasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, bantuan tenaga kerja, swadaya masyarakat, bantuan material, penyediaan konsumsi bagi pekerja, serta keterlibatan dalam Program Padat Karya Tunai.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kasi Perencanaan Desa bahwa masyarakat ikut dalam pembangunan melalui tenaga kerja, gotong royong, maupun Program Padat Karya Tunai. Selain itu, masyarakat juga melakukan swadaya melalui iuran sukarela yang dikelola RT dan RW ketika anggaran pembangunan terbatas. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya berbentuk tenaga fisik, tetapi juga dukungan ekonomi dan sosial. Masyarakat memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing sehingga pelaksanaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah desa. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Astika dan Subawa (2021), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk tenaga, pemikiran, material, dan keterlibatan dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, penelitian Kharismania dan Evi (2023) juga menunjukkan bahwa kegiatan gotong royong menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Hasil penelitian di Desa Sukamanah memperkuat kedua temuan tersebut karena gotong royong dan kontribusi masyarakat masih menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga dipengaruhi oleh komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan melalui RT, RW, dan kegiatan sosialisasi sehingga

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

masyarakat mengetahui kegiatan yang sedang dilaksanakan serta bentuk partisipasi yang dapat diberikan. Hal tersebut disampaikan oleh Pendamping Desa bahwa pemerintah desa aktif memberikan sosialisasi dan imbauan melalui RT, RW, serta pertemuan masyarakat agar warga ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan kegiatan gotong royong. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya merata. Kesibukan pekerjaan, aktivitas sehari-hari, dan tingkat keaktifan masing-masing masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi keterlibatan warga. Sebagian masyarakat memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti kegiatan pembangunan secara rutin karena harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kesediaan untuk terlibat, tetapi juga kondisi sosial ekonomi dan kemampuan masing-masing individu.

Apabila dianalisis menggunakan konsep Participatory Governance OECD (2022), keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan termasuk dalam bentuk active participation. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan masyarakat yang tidak hanya menerima informasi, tetapi turut memberikan kontribusi secara langsung melalui tenaga, gotong royong, swadaya, bantuan material, dan bentuk dukungan lainnya. Berdasarkan perspektif Governance Bevir dan Rhodes (2018), pelaksanaan pembangunan menunjukkan adanya kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa berperan sebagai koordinator dan fasilitator, sedangkan masyarakat menjadi salah satu aktor yang memberikan dukungan dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi dilaksanakan melalui keterlibatan berbagai aktor.

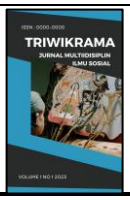
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Sukamanah telah berjalan dengan baik. Bentuk partisipasi terlihat melalui gotong royong, tenaga kerja, swadaya, bantuan material, penyediaan konsumsi, dan Program Padat Karya Tunai. Namun, keterlibatan masyarakat masih dipengaruhi oleh kesibukan pekerjaan dan tingkat keaktifan masing-masing masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Pemanfaatan hasil pembangunan merupakan tahap setelah pembangunan infrastruktur selesai dilaksanakan. Pada tahap ini, masyarakat berperan sebagai pengguna sekaligus memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hasil pembangunan agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan infrastruktur di Desa Sukamanah telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pembangunan jalan lingkungan dan akses transportasi. Infrastruktur tersebut membantu mobilitas masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi, serta mempermudah akses masyarakat menuju fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan layanan kesehatan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memanfaatkan hasil pembangunan, tetapi turut menjaga dan memelihara fasilitas yang telah dibangun. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua RW bahwa masyarakat ikut menjaga hasil pembangunan melalui kegiatan gotong royong yang biasanya dilakukan seminggu sekali untuk membersihkan jalan, saluran air, dan rumput agar tidak tersumbat ketika musim hujan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tetap berlangsung setelah pembangunan fisik selesai. Kegiatan kerja bakti dan gotong royong menjadi bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hasil pembangunan. Selain itu, masyarakat aktif juga menyampaikan bahwa jalan

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com



maupun fasilitas yang telah dibangun harus dijaga bersama melalui kegiatan kerja bakti dan perawatan agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Elvandari et al. (2025), yang menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan sehingga masyarakat memiliki kepedulian untuk menjaga fasilitas yang telah dibangun. Hasil penelitian di Desa Sukamanah memperkuat temuan tersebut karena masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap hasil pembangunan melalui kegiatan pemeliharaan dan kerja bakti. Selain itu, temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian Hussain et al. (2022), yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur perdesaan memberikan manfaat terhadap mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Hal yang sama terlihat di Desa Sukamanah, ketika pembangunan jalan dan akses lingkungan memberikan manfaat terhadap mobilitas masyarakat serta aktivitas sehari-hari.

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Keterbatasan anggaran menyebabkan pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Oleh karena itu, masih terdapat wilayah yang membutuhkan pembangunan maupun peningkatan infrastruktur. Apabila dianalisis menggunakan konsep Participatory Governance OECD (2022), keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan menunjukkan bentuk active participation. Masyarakat tidak berhenti berpartisipasi setelah pembangunan selesai, tetapi turut menjaga keberlanjutan hasil pembangunan.

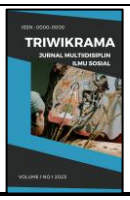
Berdasarkan perspektif Governance Bevir dan Rhodes (2018), pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur menunjukkan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa menyediakan fasilitas publik, sedangkan masyarakat menggunakan dan memelihara fasilitas tersebut. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan hasil pembangunan membutuhkan keterlibatan lebih dari satu aktor. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan di Desa Sukamanah telah berjalan cukup baik. Masyarakat menggunakan fasilitas yang telah dibangun sekaligus ikut memeliharanya melalui kerja bakti dan gotong royong. Namun, pemerataan manfaat pembangunan masih menjadi perhatian karena pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan

Pengawasan dan evaluasi merupakan tahapan penting dalam pembangunan karena bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat dapat memberikan kritik, saran, maupun laporan terhadap kondisi pembangunan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Sukamanah memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan mengenai pembangunan kepada pemerintah desa. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui musyawarah maupun melalui perangkat desa dan perangkat wilayah. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan serta menampung aspirasi masyarakat.

Informan dari BPD menyampaikan bahwa apabila terdapat pembangunan jalan atau pembangunan lainnya, pihak BPD turun langsung untuk melihat pelaksanaannya. Aspirasi masyarakat juga ditampung melalui musyawarah dan kemudian dibahas bersama pemerintah desa. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BPD menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Pengawasan dilakukan melalui

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



pemantauan terhadap pembangunan, sedangkan aspirasi masyarakat digunakan sebagai salah satu bahan pembahasan dalam proses pembangunan. Dari sisi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang aktif memiliki kepedulian terhadap kondisi infrastruktur. Apabila ditemukan kerusakan atau kekurangan, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada pemerintah desa. Sebagaimana disampaikan oleh masyarakat aktif bahwa apabila terdapat kerusakan, masyarakat biasanya melaporkannya kepada pemerintah desa agar dapat diperbaiki. Meskipun tidak selalu langsung dikerjakan, laporan tersebut tetap dimasukkan ke dalam usulan pembangunan berikutnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah menjalankan fungsi pengawasan sosial melalui penyampaian laporan terhadap kondisi infrastruktur. Meskipun laporan tidak selalu dapat langsung ditindaklanjuti karena keterbatasan anggaran, penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pembangunan. Apabila dianalisis berdasarkan konsep Participatory Governance OECD (2022), keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi menunjukkan adanya bentuk active participation karena masyarakat memberikan umpan balik berupa kritik, saran, dan laporan kepada pemerintah desa. Masyarakat tidak hanya menerima hasil pembangunan, tetapi turut memberikan masukan terhadap keberlanjutan dan perbaikan pembangunan.

Sementara itu, berdasarkan perspektif Governance Bevir dan Rhodes (2018), pengawasan pembangunan menunjukkan adanya hubungan antaraktor antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Pemerintah desa menjalankan pembangunan, BPD melakukan fungsi pengawasan, sedangkan masyarakat memberikan pengawasan sosial melalui penyampaian laporan dan aspirasi. Dengan demikian, pengawasan pembangunan menjadi bagian dari tata kelola yang melibatkan lebih dari satu aktor. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Pitu (2021), yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi cenderung lebih rendah dibandingkan keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi serupa terlihat di Desa Sukamanah, ketika pengawasan dan evaluasi masih lebih banyak dilakukan oleh masyarakat yang aktif serta melalui mekanisme perwakilan.

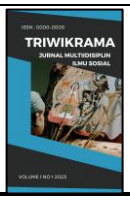
Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan di Desa Sukamanah telah berjalan cukup baik, tetapi belum merata. Masyarakat telah memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, saran, dan laporan, sedangkan BPD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan. Namun, partisipasi masih lebih banyak dilakukan oleh masyarakat yang aktif sehingga diperlukan peningkatan informasi dan mekanisme penyampaian aspirasi agar keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat semakin luas.

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, ditemukan beberapa temuan utama yang berkaitan dengan bentuk partisipasi masyarakat, faktor yang memengaruhi partisipasi, serta upaya pemerintah desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat.

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sukamanah telah terlibat dalam empat tahapan pembangunan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, masyarakat berpartisipasi melalui penyampaian aspirasi dan usulan pembangunan melalui Musdes, Musrenbangdes, RT, RW, dan BPD. Namun, keterlibatan langsung masyarakat masih terbatas karena sebagian aspirasi disampaikan melalui mekanisme perwakilan. Temuan ini memperkuat penelitian Kharismania dan Evi (2023) mengenai pentingnya forum musyawarah sebagai sarana partisipasi masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa keterlibatan langsung masyarakat di Desa Sukamanah masih perlu diperluas.

Pada tahap pelaksanaan, masyarakat berpartisipasi melalui gotong royong, tenaga kerja, bantuan material, swadaya, penyediaan konsumsi, serta Program Padat Karya Tunai. Temuan tersebut sejalan dengan Astika dan Subawa (2021), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat berbentuk tenaga, pemikiran, material, dan keterlibatan dalam kegiatan pembangunan. Pada tahap pemanfaatan, masyarakat menggunakan sekaligus menjaga hasil pembangunan melalui kegiatan kerja bakti dan gotong royong. Temuan ini memperkuat penelitian Elvandari et al. (2025) mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan dan menunjukkan bahwa partisipasi tidak berhenti ketika pembangunan fisik telah selesai.

Sementara itu, pada tahap pengawasan dan evaluasi, masyarakat berpartisipasi melalui penyampaian kritik, saran, dan laporan mengenai kondisi pembangunan kepada pemerintah desa maupun perangkat wilayah. Namun, partisipasi pada tahap ini belum semerata partisipasi dalam pelaksanaan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Pitu (2021), yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi cenderung lebih rendah dibandingkan keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Sukamanah telah berlangsung pada seluruh tahapan pembangunan, tetapi tingkat keterlibatannya belum sama. Partisipasi paling terlihat pada tahap pelaksanaan melalui gotong royong dan swadaya, sedangkan partisipasi pada tahap perencanaan serta pengawasan masih lebih banyak melalui mekanisme perwakilan dan masyarakat yang aktif.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sukamanah.

a. Faktor Pendukung

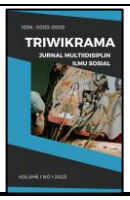
1. Budaya gotong royong masyarakat

Budaya gotong royong menjadi salah satu faktor yang mendukung partisipasi masyarakat. Masyarakat memiliki kesadaran bahwa pembangunan desa merupakan kepentingan bersama sehingga bersedia memberikan tenaga, waktu, maupun swadaya. Temuan mengenai gotong royong ini sejalan dengan penelitian Kharismania dan Evi (2023), yang menunjukkan bahwa gotong royong menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Keterbukaan pemerintah desa

Pemerintah desa menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui Musdes, Musrenbangdes, komunikasi melalui RT/RW, serta penyampaian kritik dan saran. Keterbukaan tersebut membentuk komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kharismania dan Evi (2023), yang menempatkan komunikasi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai salah satu unsur yang memengaruhi keterlibatan masyarakat.

3. Manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat

Masyarakat cenderung terdorong untuk terlibat ketika pembangunan memberikan manfaat langsung, seperti pembangunan jalan yang mempermudah mobilitas dan aktivitas ekonomi. Manfaat yang dirasakan masyarakat dapat meningkatkan kepedulian dan keinginan untuk mendukung pembangunan serta menjaga fasilitas yang telah dibangun.

b. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan informasi

Tidak semua masyarakat mengetahui mekanisme partisipasi dalam pembangunan desa. Masyarakat biasa dan masyarakat pendatang masih memiliki keterbatasan informasi mengenai forum musyawarah maupun mekanisme penyampaian aspirasi. Kondisi tersebut menyebabkan keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya merata.

2. Keterbatasan waktu dan aktivitas masyarakat

Kesibukan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak aktif mengikuti kegiatan pembangunan. Masyarakat yang bekerja sebagai buruh harian lepas dan petani cenderung memiliki keterbatasan waktu karena harus memprioritaskan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Masyarakat yang lebih aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki waktu lebih banyak cenderung lebih sering terlibat dalam pembangunan. Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian Astika dan Subawa (2021), yang menemukan adanya hambatan berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh tingkat keaktifan dan kondisi masing-masing masyarakat.

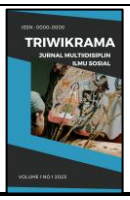
3. Keterbatasan anggaran pembangunan

Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan secara langsung. Pemerintah desa harus menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan, kondisi lapangan, dan kemampuan anggaran. Kondisi tersebut juga memengaruhi pemerataan pembangunan serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kesediaan individu untuk terlibat, tetapi juga dipengaruhi oleh komunikasi pemerintah desa, kesadaran masyarakat, manfaat pembangunan, kondisi sosial ekonomi, keterbatasan waktu, dan ketersediaan anggaran. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan tingkat keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan.

Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sukamanah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Pertama, pemerintah desa menyediakan ruang partisipasi melalui Musdes dan Musrenbangdes sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat. Melalui forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan, usulan, dan permasalahan pembangunan di lingkungan masing-masing.

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com



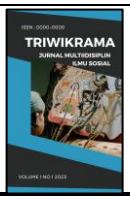
Kedua, pemerintah desa meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi melalui RT, RW, kegiatan masyarakat, serta media komunikasi desa agar masyarakat mengetahui program pembangunan dan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan. Ketiga, pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui gotong royong, swadaya masyarakat, dan Program Padat Karya Tunai. Upaya tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi secara langsung sesuai dengan kemampuan masing-masing, baik melalui tenaga maupun dukungan lainnya. Keempat, pemerintah desa membangun kerja sama dengan berbagai unsur masyarakat seperti BPD, RT/RW, tokoh masyarakat, Karang Taruna, pendamping desa, dan kelompok masyarakat lainnya. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memperluas keterlibatan masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya mengandalkan kemampuan internal pemerintah, tetapi berusaha melibatkan masyarakat dan aktor lain dalam proses pembangunan. Kondisi tersebut sesuai dengan perspektif Governance Bevir dan Rhodes (2018), yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah sebagai aktor tunggal, tetapi melalui hubungan dan interaksi dengan berbagai aktor. Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Sukamanah telah berjalan pada seluruh tahapan pembangunan, tetapi dengan tingkat keterlibatan yang berbeda. Masyarakat relatif lebih aktif dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya melalui gotong royong dan swadaya, sedangkan keterlibatan langsung dalam perencanaan serta pengawasan dan evaluasi masih perlu ditingkatkan. Hasil tersebut memperkuat beberapa penelitian terdahulu mengenai pentingnya musyawarah, gotong royong, komunikasi, serta pengawasan masyarakat, sekaligus menunjukkan kondisi spesifik Desa Sukamanah dalam praktik tata kelola pembangunan infrastrukturnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat telah terlaksana pada seluruh tahapan pembangunan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, serta pengawasan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, masyarakat menyampaikan aspirasi melalui RT, RW, BPD, Musyawarah Desa (Musdes), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), meskipun keterlibatan secara langsung masih belum optimal karena lebih banyak dilakukan melalui perwakilan. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat terlihat melalui kegiatan gotong royong, swadaya tenaga, dan Program Padat Karya Tunai (PKT). Sementara itu, dalam pemanfaatan hasil pembangunan, masyarakat menggunakan sekaligus menjaga fasilitas yang telah dibangun, seperti pasar desa, aula desa, jalan, dan drainase. Adapun pada tahap pengawasan dan evaluasi, masyarakat turut menyampaikan masukan, kritik, serta laporan mengenai kondisi infrastruktur kepada pemerintah desa, meskipun keterlibatan dalam evaluasi formal masih belum merata.

Partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, keterbukaan informasi mengenai program pembangunan, budaya gotong royong yang masih terpelihara, serta adanya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi melalui forum musyawarah. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu akibat pekerjaan masyarakat sebagai buruh harian lepas dan petani, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk terlibat secara



aktif, keterbatasan anggaran pembangunan desa, serta belum meratanya partisipasi pada tahap perencanaan dan evaluasi. Dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya melalui penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes, penyebaran informasi melalui RT, RW, dan media informasi desa, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai, serta penguatan kegiatan gotong royong dan pemeliharaan infrastruktur. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat telah berjalan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal karena keterlibatan masih lebih dominan pada tahap pelaksanaan dibandingkan perencanaan serta pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah Desa Sukamanah diharapkan dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan keterbukaan informasi mengenai kegiatan pembangunan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah desa juga perlu memperluas ruang partisipasi sehingga masyarakat tidak hanya terlibat melalui perwakilan, tetapi memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan. Selain itu, waktu pelaksanaan musyawarah, sosialisasi, dan gotong royong perlu mempertimbangkan kesibukan serta aktivitas pekerjaan masyarakat. Pemerintah desa bersama BPD dan lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, Karang Taruna, dan PKK juga perlu memperkuat koordinasi dalam menghimpun aspirasi serta mendorong keterlibatan masyarakat yang selama ini belum aktif. Di sisi lain, masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, serta tetap menjaga budaya gotong royong dan swadaya untuk mendukung keberlanjutan hasil pembangunan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian partisipasi masyarakat menggunakan pendekatan kuantitatif maupun metode campuran (*mixed methods*) agar tingkat partisipasi dan faktor-faktor yang memengaruhinya dapat dianalisis secara lebih terukur. Penelitian juga dapat memperluas lokasi kajian melalui perbandingan antarwilayah dengan karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan tata kelola pemerintahan yang berbeda. Selain itu, pelibatan informan yang lebih beragam, seperti kelompok perempuan, pemuda, kelompok tani, pelaku usaha, masyarakat miskin, dan masyarakat yang belum aktif dalam kegiatan desa, diperlukan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas. Kajian berikutnya juga dapat mengembangkan pembahasan mengenai kepemimpinan pemerintah desa, efektivitas komunikasi publik, transparansi pemerintahan, kapasitas kelembagaan, kondisi sosial ekonomi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung pembangunan desa.

5. DAFTAR PUSTAKA

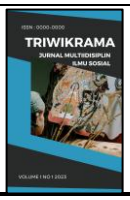
A. Buku

Bevir, M. & Rhodes, R. A. W. 2018. Rethinking Governance: Ruling, Rationalities and Resistance. Routledge.

Creswell, J. W. & Poth, C. N. 2018. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. 4th ed. Sage Publications.

Hurst, A. 2023. Introduction to Qualitative Research Methods: A Helpful Guide for Undergraduates and Graduate Students in the Social Sciences. Oregon State University.

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com



Mardikanto, T. & Soebianto, P. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta.

Miles, M. B., Huberman, A. M. & Saldaña, J. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd ed. SAGE Publications.

Sugiyono. 2023. Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.

B. Jurnal Nasional

Astika, A. N. & Subawa, N. S. 2021. Evaluasi pembangunan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun. Jurnal KIMAP, 5(4), 223–232.

Djiko, R. & Dalensang, R. 2021. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Pitu. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan, 6(1), 1–15. https://doi.org/10.33701/j-3p.v6i1.1533

Elvandari, D. A., Anwar, S. & Kasogi, M. A. 2025. Dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Development Policy and Management Review (DPMR), 5(1), 39–51.

Kharismania, F. & Evi, P. 2023. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Cibarusah Kota. POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3(2), 144–159.https://doi.org/10.22225/politicos.3.2.2023.144-159

C. Jurnal Internasional

Antó, J. M., Martí, J. L., Casals, J., Bou-Habib, P., Casal, P., Fleurbaey, M., Frumkin, H., Jiménez-Morales, M., Jordana, J., Lancelotti, C., Llavador, H., Mélon, L., Solé, R., Subirada, F. & Williams, A. 2021. The Planetary Wellbeing Initiative: Pursuing the Sustainable Development Goals in Higher Education. Sustainability, 13(6), Article 3372. https://doi.org/10.3390/su13063372

Feng, W., Zhao, L. & Chen, Y. 2022. Research on collaborative innovation mode of enterprise group from the perspective of comprehensive innovation management. Sustainability, 14(9), Article 5304. https://doi.org/10.3390/su14095304

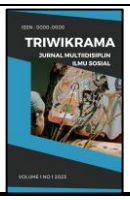
Foster, V., Gorgulu, N., Straub, S. & Vagliasindi, M. 2023. The Impact of Infrastructure on Development Outcomes: A Qualitative Review of Four Decades of Literature. Policy Research Working Paper No. 10343. World Bank. https://doi.org/10.1596/1813-9450-10343

Hussain, S., Maqbool, R., Hussain, A. & Ashfaq, S. 2022. Assessing the socio-economic impacts of rural infrastructure projects on community development. Buildings, 12(7), Article 947. https://doi.org/10.3390/buildings12070947

Shetunyenga, N. N. T. 2023. An exploration of the barriers to community participation in development within Ompundja Constituency. Open Journal of Social Sciences, 11(9), 399–414. https://doi.org/10.4236/jss.2023.119026

Shetunyenga, N. N. T. 2024. The value of community participation in rural development. Open Journal of Social Sciences, 12(8), 520–533. https://doi.org/10.4236/jss.2024.128031

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Tung, D. T., Diem, L. T. T., Luan, D. X. & Linh, N. H. K. 2022. The National Target Program for New Rural Development in Vietnam: An understanding of people's participation and its determinants. Sustainability, 14(19), Article 12140. https://doi.org/10.3390/su141912140

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

E. Dokumen Resmi

OECD. 2022. Building Trust and Reinforcing Democracy: Preparing the Ground for Government Action. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/76972a4a-en

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com